

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Hubungan antar negara, politik luar negeri dan diplomasi merupakan tiga kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka usaha setiap negara dalam usahanya untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan-kepentingan negara tersebut di dunia internasional. Keadaan dalam dunia internasional yang tidak statis yang selalu berkembang dan berubah-ubah juga ikut mempengaruhi dinamika hubungan diantara dua negara atau lebih.

Tidak terkecuali juga hal ini dialami oleh Indonesia dan Australia, dua negara yang bertetangga dimana hubungan negara Indonesia dengan Australia telah dibangun dalam konteks historis cukup panjang yaitu sejak 1947. Hubungan bilateral diantara dua negara ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan juga ikut dipengaruhi oleh keadaan situasi dan kondisi di dunia internasional. Akan tetapi sebagai dua negara tetangga yang berdekatan dan saling membutuhkan mau tidak mau Indonesia dan Australia harus dituntut untuk saling menjaga keharmonisan hubungan bilateral diantara keduanya.

Hal ini tercermin dalam kerjasama Jakarta-Canberra untuk mengatasi isu pendatang ( imigran ) gelap dari Afghanistan dan Timur Tengah serta pemulangan pengungsi Timur-Timur dari Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga rasa saling membutuhkan itu tercermin sejak dua tahun lalu yang tercetus melalui Komunike

Երկրորդ ՄԱԿԻ ( Աստղաին-Ինդոնեզիոյ Միջուկային Բռնարկ Բողոքի Էրկոթում )  
աշտի-տարբերակող իր Էրկոթումը շարժելով զոր Էրկոթը իրա շարժելով Էրկոթումը  
Երկրորդի Դիմում-Դիմում զոր Դիմում Էրկոթումը Դիմում Զարկի իր Դիմումը շարժելով  
Երկրորդի ( Դիմում ) շարժելով զոր Դիմում Էրկոթումը շարժելով Երկրորդի

Իր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը

Երկրորդի Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Զարկի զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը

Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը

Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը

Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը շարժելով զոր Դիմումը  
Կ. Կրկնային Երկրորդի Դիմումը

ԵՐԿՐՈՐԴԻ  
ԵՐԿՐՈՐԴԻ

dan Pertanian. Rencana Aksi Kerjasama Kesehatan dan Nota Kesepahaman Kerjasama Perhubungan yang pernah ditanda tangani di Canberra pada tanggal 8 Desember 2000.<sup>1</sup>

Akan tetapi hubungan yang harmonis itu terganggu lagi dikarenakan pemberian 42 suaka kepada warga Papua yang pro kemerdekaan oleh Australia pada bulan Maret 2006 kemarin. Hal ini tentu saja membuat pemerintah Indonesia merasa marah dan tersinggung karena pemerintah Indonesia beranggapan bahwa Australia sudah mencampuri lebih dalam urusan permasalahan internal dalam negeri Indonesia. Sedangkan dari pemerintah Australia sendiri merasa tidak bersalah karena telah memberikan suaka tersebut dan bersikeras untuk tidak mau meminta maaf kepada pemerintah Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Indonesia maupun pihak Australia dalam rangka menyelesaikan masalah pemberian suaka telah ditempuh. Karena kedua pihak tidak mau hubungan yang telah dibangun sejak lama menjadi rusak dan putus dan lagipula kedua negara ini saling membutuhkan antar satu sama lain.

Berdasarkan uraian tersebut, maka coba untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana prospek hubungan antara kedua negara tersebut, maka kemudian penelitian ini diberi judul: **“HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA DALAM ISU PEMBERIAN SUAKA 43 WARGA PAPUA”**

---

<sup>1</sup> Suara Merdeka, 6 Februari 2002

## **B. Tujuan Penulisan**

1. Dalam melakukan penelitian ini, mempunyai tujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan teori atau konsep yang relevan dan hipotesa.
2. Untuk membuktikan hipotesa yang ada apakah memang benar terbukti atau tidak.
3. Mengetahui bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia terkait pemberian suaka kepada 43 warga Papua.
4. Memenuhi syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara yang besar dan sangat berpengaruh pada masing-masing kawasannya sangat diperlukan adanya rasa saling menghormati dan kerjasama agar tercipta kestabilan keamanan kawasan. Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dan merupakan *major state* sangat berpengaruh pada kestabilan keamanan dan pemeliharaan perdamaian di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Begitu juga dengan Australia yang merupakan negara yang besar dan maju, amat berpengaruh dalam kestabilan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik Selatan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Jusuf Wanandi, *Australia-Indonesia Relations In The Context of Development In Asia Pacific*;  
Jusuf Wanandi, *ASEAN and Australia Relations*, CSIS, Jakarta, 1992, hal.9

Hubungan antara Indonesia dan Australia diawali menjelang kemerdekaan Indonesia. Di dunia internasional Australia ikut berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti terus mengikuti perkembangan di Indonesia setelah terjadinya penandatanganan Perjanjian Linggarjati antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia. Australia yang pada waktu itu menjadi anggota tidak tetap Dewan keamanan (DK) PBB juga mengecam aksi militer yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada 20 Juli 1947. Sejak saat itu Australia mulai memasuki secara langsung ke dalam wilayah persoalan kemerdekaan Indonesia.

Pergantian pemerintahan di Australia dari Partai Buruh kepada koalisi Partai Liberal-Country membawa perubahan pula dalam hubungan antara Australia dengan Indonesia. Pemerintahan Australia dengan Koalisi Liberal-Country di bawah pimpinan PM Menzies menjalankan kebijakan politik luar negeri yang berbeda dengan pemerintahan Australia sebelumnya dimana masih dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Percy C. Spender.

Kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh Indonesia yang bersikap anti-Barat pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dengan membina hubungan persahabatan dengan negara-negara yang berideologi sosialis-komunis seperti Vietnam Utara, Korea Utara, RRC maupun US membuat hubungan antara Indonesia dengan Australia merenggang karena kebijakan luar negeri Pemerintah Australia di bawah PM Menzies dipengaruhi oleh situasi Perang Dingin yang membuat Australia

Australia dengan menyatakan keinginannya agar Belanda tetap menguasai Irian Barat.

Hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dengan Australia bertambah dingin ketika Irian Barat menjadi wilayah bagian dari Indonesia pada tahun 1962 setelah melalui Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di bawah supervisi PBB pada 1969 dan pada periode ini pula merupakan titik terendah dalam hubungan antara Indonesia dan Australia.

Hubungan antara Indonesia dan Australia mulai membaik dan normal kembali sehubungan dengan pergantian pemerintahan di Indonesia, menyusul percobaan kudeta oleh PKI pada 1965, yang dikenal dengan Peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). Munculnya Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto disambut baik oleh kalangan politisi Australia. Australia segera mengakui kepemimpinan Orde Baru, karena Indonesia memperlihatkan sikap anti-komunis yang keras dan menjalankan kebijakan luar negeri yang pro-Barat.<sup>3</sup>

Hubungan yang harmonis antara Indonesia dan Australia kembali terusik pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Hal ini karena insiden lepasnya propinsi Timor-Timur sebagai propinsi termuda di Indonesia dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Australia dinilai terlalu agresif dalam mendukung kemerdekaan Timor-Timor, hal ini terbukti dengan dikirimkannya pasukan militer Australia ke Timor-Timor pada bulan Februari 1999 jauh hari sebelum terjadinya kesepakatan dengan PBB pada tanggal 5 Mei 1999. Sempat terjadi kontak senjata antara Pasukan Australia dengan Brimob Indonesia di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) -

---

<sup>3</sup> Z. M. S. Y. (1994). *Sistem Politik Australia / Bandung: PT Remaja Rosdakarya dengan LIP-FISIP-UII*

pertama kalinya pasca jajak pendapat di Timor-Timor, diadakan pertemuan setingkat menteri luar negeri yang melibatkan tiga negara yakni antara Indonesia- Australia- Timor Leste. Wakil dari Indonesia adalah Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda, wakil dari Australia adalah Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer, wakil dari Timor Leste adalah Ketua UNTAET Sergio Viera Ede Mello yang merupakan pemerintahan PBB sementara di Timor Leste dan Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Melia Nusa Dua, Denpasar, Bali dimana dalam pertemuan tersebut membahas tentang kerjasama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan ekonomi, pemberantasan terorisme, imigran gelap, serta peredaran dan perdagangan obat-obatan terlarang.

Kerjasama antara Indonesia dengan Australia makin dipererat lagi setelah adanya peristiwa serangan terorisme yaitu bom Bali dan peledakan yang terjadi di depan Kantor Kedubes Australia di Kuningan Jakarta yang dikenal sebagai Bom Kuningan yang bagi banyak orang Australia, serangan tersebut secara nyata menunjukkan ancaman bagi keamanan negerinya. Banyaknya warga Australia yang menjadi korban dan juga kedekatan mereka dengan Bali, membuat serangan bom di Kuta itu secara emosional sangat melukai Australia sebab Australia secara langsung merasakan akibat dari peledakan bom tersebut.<sup>4</sup>

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini hubungan dua negara ini kembali terusik. Hal ini disebabkan karena diberikannya suaka kepada 42 warga Papua yang pro kemerdekaan dari pemerintahan Australia pada

Indonesia karena pemerintah Indonesia menganggap bahwa pemerintah Australia sudah mencampuri wilayah kedaulatan Indonesia lebih dalam dan itu artinya pemerintah Australia mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar Papua bisa untuk memisahkan diri dari kesatuan wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri baru menempuh tiga langkah dalam menyikapi pemberian suaka kepada 42 warga Papua yang pro kemerdekaan oleh Australia yaitu menyampaikan protes kepada pemerintah Australia, membuat nota diplomatik, dan memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra, Australia. Apabila pemerintah Indonesia masih kurang puas dengan tindakan tersebut maka langkah berikutnya yang bisa diambil adalah menarik secara permanen duta besar Indonesia di Australia. Sedangkan dua langkah lagi yaitu berupa pengusiran duta besar Australia di Jakarta dan penurunan derajat hubungan diplomatik ke titik paling rendah akan dilakukan apabila kemungkinan buruk terjadi menyusul perkembangan berikutnya.

Sedangkan tindakan dari Australia sendiri menanggapi tindakan dari pemerintah Indonesia adalah melalui PM John Howard mengeluarkan pernyataan resminya dalam menjawab nota protes yang dikirimkan dari pemerintah Indonesia melalui Kedubes Australia bahwa pemerintahan Australia tidak akan mengucapkan permintaan maaf kepada Indonesia meskipun Indonesia telah menarik pulang duta besarnya di Canberra, Teuku Mohamad Hamzah Thayeb. PM John Howard yakin hubungan antara Australia dengan Indonesia akan membaik seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir. Dan keputusan Australia tentang pemberian suaka tersebut tidak akan berdampak terhadap perundingan yang tengah dilakukan oleh kedua

Pemerintahan Australia bisa mengerti atas tindakan reaksi keras Indonesia atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Namun pihak pemerintah Australia tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari penulisan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan, “Mengapa Indonesia tetap memilih menjaga hubungan diplomatik dengan Australia terkait pemberian suaka politik pada 43 warga Papua?”

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori sangat diperlukan dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Karena dengan kerangka dasar teori itulah penulis akan menggunakannya sebagai dasar dalam penulisan ilmiah.

Menurut Mochtar Mas'ood bahwa teori itu berupa sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.<sup>5</sup> Sehingga, teori pasti hasil dari gabungan beberapa konsep yang membentuk suatu kesimpulan. Sedangkan konsep sendiri adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu.<sup>6</sup>

Dalam penulisan penelitian ini, dalam kerangka dasar teori penulis akan menggunakan beberapa konsep dan teori sebagai acuan dalam penulisan.

---

<sup>5</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: IPRES, 1990

## 1. Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional adalah

The image in the mirror of our fellows minds ( that is, our prestige), rather than the original, of which the image in the mirror may be but the distorted reflection determines what we are as member of society. It's purpose is to impress other nation actually possesses, or with the power it believes, or wants the other nations to believe, it possesses.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Jack C. Plano & Roy Olton, kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah dan kesejahteraan ekonomi.<sup>8</sup>

Menurut Departemen Luar Negeri (DEPLU) Republik Indonesia konsep kepentingan nasional yang diterjemahkan ke dalam visi Departemen Luar Negeri yang disebut sebagai "Sapta Dharma Caraka" adalah:

(1) Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia; (2) membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih teknologi; (3) meningkatkan peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang; (4) memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme; (5) meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hal asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia; (6) meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia

<sup>7</sup> Hans J. Morgenthau and Kenneth W. Thompson, *Politics Among Nations: The Struggle For Power & Peace*, Alfred A. Knopf, New York, 1985, hal.87

<sup>8</sup> Jack C. Plano & Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Terjemahan Wawan Juanda,





## 2. Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri

Untuk dapat memahami kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Demikian pula dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, sebuah negara akan mempergunakan politik luar negerinya. Kebijakan luar negeri sebagaimana diungkapkan Jack C. Plano dan Roy Olton dirumuskan sebagai berikut: *"Foreign policy is strategy of plan course of action developed by the decision makers of state vis avis other state or international antities aimed at achieving specific goals defined intern of national interest."*<sup>10</sup>

Untuk menganalisa sebuah kebijakan luar negeri akan digunakan Teori Proses Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri menurut William D. Coplin. Tindakan politik luar negeri dipandang sebagai akibat tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat keputusan politik luar negeri yaitu<sup>11</sup>

1. Kondisi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya sebagai dasar tingkah laku,
2. Kemampuan ekonomi dan militer, termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan, dan
3. Konteks internasional, yaitu posisi khusus negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional tersebut.

Penjelasan tersebut dapat lebih terinci untuk disimak dalam diagram teori pengambilan keputusan luar negeri sebagai berikut:

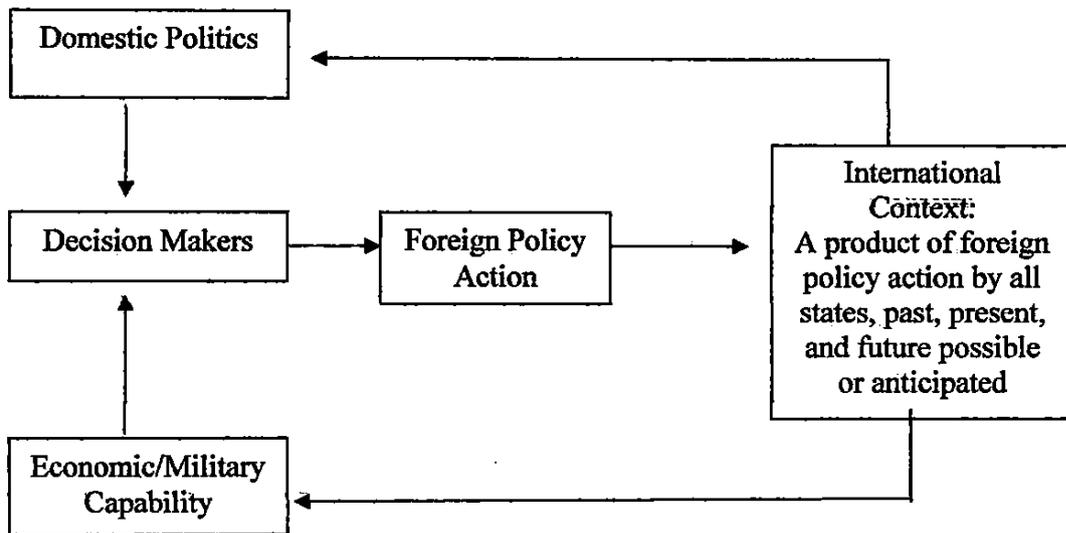
---

<sup>10</sup> Jack C. Plano and Ray Olton, *The International Dictionary*, Holt Rinchari, Winston Inc, Western Machigan University New York, 1973, Hal.127

<sup>11</sup> William D. Coplin & Charles W. Kegley, *Multi Method Introduction to International Politics*

## Bagan I

### Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri<sup>12</sup>



#### 1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Para perumus kebijakan luar negeri adalah orang-orang yang dihadapkan pada situasi-situasi tertentu yang bertanggung jawab kepada orang lain yang ditekan oleh beragam kondisi dan dipaksa untuk mengambil keputusan. Pada bagian diatas digambarkan bahwa para pengambil keputusan dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri serta kondisi ekonomi dan militer negara yang bersangkutan. Sementara itu, kondisi politik dalam negeri tidak dapat terlepas dari pengaruh-pengaruh aktor dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik dalam negeri. Aktor-aktor dalam negeri tersebut diantaranya:<sup>13</sup>

1. *Birokrat* merupakan individu-individu ataupun organisasi didalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam

<sup>12</sup> William D. Coplin & Charles W. Kegley, *Multi Method Introduction to International Politics* Chicago, Arkheim Publics Com, 1971, hal.10

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 82-91

menyusun serta melaksanakan kebijakan. Organisasi ini biasanya tersusun sesuai dengan garis fungsional, contohnya dalam kebijakan-kebijakan ekonomi, politik luar negeri, atau kebijakan-kebijakan lainnya.

2. *Partai Politik* bertujuan menterjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis. Dengan kata lain tuntutan dari masyarakat yang menyangkut kebijakan umum disampaikan oleh parpol kepada pemerintah. Dengan demikian parpol dapat mempengaruhi para pengambil keputusan dan juga masyarakat. Meski partai politik lebih banyak mempengaruhi kebijakan dalam negeri tetapi juga tidak menutup kemungkinan parpol juga mempengaruhi politik luar negeri.

3. *Kelompok Kepentingan* terdiri dari sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan bersama. Kebanyakan kelompok kepentingan bersifat ekonomis karena orang-orang sering dimotivasi untuk melakukan tindakan kolektis melalui persamaan kepentingan ekonomi. Kepentingan yang bersifat non ekonomis juga bisa digunakan sebagai dasar tindakan kolektis, terutama bila ada ikatan etnis atau geografis diantara mereka.

4. *Massa atau Opini Publik* biasanya didapatkan dari sosialisasi kebijakan politik yang akan diambil. Jika suatu populasi yang opininya dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan, maka dalam hal ini merupakan sebuah dukungan atas kebijakan yang akan diambilnya. Memperhatikan opini dari masyarakat ini juga sangat penting sekali manakala

... dan pemimpin melakukan massa dalam politik

Satu hal yang perlu ditambahkan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor-aktor rasional. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi.<sup>14</sup> Sehingga dengan demikian, para pengambil kebijakan akan melakukan penalaran untuk menetapkan pilihan dari serangkaian alternative yang ada.

Yang termasuk aktor-aktor dalam negeri sebagai pengambil keputusan permasalahan pemberian suaka oleh pemerintah Australia kepada 42 warga Papua adalah birokrat baik berupa individu ataupun organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yaitu Departemen Luar Negeri oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda karena disini Deplu sebagai motor penggerak dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan Laksamana (Purn) Widodo AS beserta Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Kondisi domestik memiliki pengaruh dalam menentukan *output* kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk budaya dan sistem politik yang berjalan beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Dalam kasus adanya pemberian suaka yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada 42 warga Papua, Pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan yang cepat agar permasalahan tidak menjadi berlarut-larut di bawah adanya tekanan dari berbagai pihak untuk segera

diputuskan hubungan diplomatik dengan Australia disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Priyo Budi Santoso.

Partai politik dalam menyikapi permasalahan pemberian suaka dari pemerintah Australia ini agar disikapi tidak terburu-buru. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir. Beliau menyatakan bahwa<sup>15</sup>

*"Indonesia masih memiliki lima "amunisi" lagi untuk melawan provokasi Australia. Kelima langkah tersebut bisa ditempuh RI sebagai negara yang berdaulat. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah pemerintah menurunkan status diplomatik ke tingkat yang paling rendah. Saat ini, pemerintah baru menempuh tiga langkah. Yakni, menyampaikan protes, nota diplomatik, dan memanggil pulang duta besar RI di Canberra, Australia. Jika pemerintah belum puas, langkah berikutnya yang bisa diambil adalah menarik (permanen) duta besar kita di Australia.*

*Berikutnya, kita bisa mengusir pulang duta besar Australia di Jakarta," tegasnya. Bila Australia masih macam-macam juga, derajat hubungan diplomatik bisa diturunkan ke titik yang paling rendah.*

*Bersamaan dengan itu, Indonesia bisa memutuskan kontak dagang dan program bantuan keuangan dengan Australia. Bila Australia masih juga melecehkan Indonesia, langkah terakhir adalah memutuskan hubungan diplomatik. "DPR juga harus segera bersikap secara resmi," katanya.*

*Hanya, karena DPR sedang reses hingga 1 Mei mendatang, dia minta fraksi-fraksi di DPR menempuh langkah darurat dengan menggelar rapat khusus, terutama Komisi I yang membidangi luar negeri. "Lewat fraksi PAN, saya mengusulkan dilakukan sidang khusus DPR untuk menyikapi manuver Australia," tandasnya.*

Reaksi tentang pemberian suaka tidak hanya datang dari Partai Amanat Nasional (PAN) saja, tapi juga datang dari Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Mereka berpendapat sama yaitu mendesak segera diputuskannya hubungan diplomatik dengan Australia.

Sedangkan reaksi dari kelompok kepentingan terhadap permasalahan pemberian suaka ini bermacam-macam. Reaksi keras disampaikan oleh para importer dalam negeri yang tergabung dalam Gabungan Importer Nasional Seluruh Indonesia

---

<sup>15</sup> <http://www.harianbatampos.com>



(Ginsi) yang berjumlah sekitar 7800 importer. Mereka yang diwakili oleh Ketua Umum-nya yaitu Amiruddin Saud menyampaikan pernyataan resminya di Jakarta bahwa mereka akan memboikot barang-barang produk asal Australia yang secara resmi berlaku efektif mulai tanggal 6 April 2006. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk protes atas pemberian suaka terhadap 42 warga Papua oleh Australia.

Sedangkan Massa atau opini publik di dalam negeri tentang menyikapi pemberian suaka kepada 42 warga Papua sebagian besar bereaksi keras dan menuntut pemerintah agar segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia. Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Jakarta. Bahkan terjadi perang antar media massa dengan pers di Australia. Pers dalam negeri membuat karikatur untuk mengejek Perdana Menteri Australia John Howard. Hal ini dilakukan untuk membalas perlakuan pers di Australia karena telah mengejek Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui karikatur juga.

## **2. Kondisi Ekonomi dan Militer**

Selanjutnya pengambilan keputusan juga sangat bergantung pada kemampuan ekonomi dan militer negara. Kemampuan ekonomi dapat diukur dengan melihat *Gross National Product*-nya (GNP), yaitu semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam masa setahun. Selain GNP, indikator ekonomi lainnya adalah pendapatan perkapita serta dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi negara tersebut.<sup>16</sup> Secara ekonomi Indonesia dan Australia adalah dua negara yang saling tergantung satu sama lain. Dalam bidang ekonomi, Australia adalah salah satu

---

<sup>16</sup> ... .. "Ditinjau Kembali: ... .." CV. Singa Bara

(Gini) yang berjumlah sekitar 7800 importer. Mereka yang diwakili oleh Ketua  
Forum-172 yaitu Aminuddin Saad menyampaikan pernyataan resminya di Jakarta  
bahwa mereka akan menboikot barang-barang produk asal Australia yang secara  
resmi berlaku efektif mulai tanggal 6 April 2000. Hal ini mereka lakukan sebagai  
bentuk protes atas pemberian suaka terhadap 42 warga Papua oleh Australia.

Sedangkan Massa atau opini publik di dalam negeri tentang menyikapinya  
pemberian suaka kepada 42 warga Papua sebagai bentuk protes ketas dan menuntut  
pemerintah agar segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia.  
Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) menggelar aksi unjuk rasa di depan  
Kedutaan Besar (Kebes) Australia di Jakarta. Bahkan terjadi perusakan antar media  
massa dengan pers di Australia. Per dalam negeri membuat karikatur untuk  
menggejek Perdana Menteri Australia John Howard. Hal ini dilakukan untuk  
membalas pembatasan pers di Australia karena telah menggejek Presiden Susilo  
Bambang Yudhoyono melalui karikatur juga.

### 3. Koalisi Ekonomi dan Militer

Selanjutnya pengambilan keputusan juga sangat bergantung pada kemampuan  
ekonomi dan militer negara. Kemampuan ekonomi dapat diukur dengan melihat  
Gross National Product-nya (GNP), yaitu semua barang dan jasa yang diproduksi  
oleh suatu negara dalam masa setahun. Selain GNP, indikator ekonomi lainnya  
adalah pendapatan perkapita serta dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi  
negara tersebut.<sup>10</sup> Secara ekonomi Indonesia dan Australia adalah dua negara yang  
saling tergantung satu sama lain. Dalam bidang ekonomi, Australia adalah salah satu

<sup>10</sup> Colin, William D. "Perdagangan Global Internasional: Suatu Telaah Teoritis", CV. Rineo, Bandung, 1997 Ed. 2, hal. 112

negara yang memiliki perekonomian terbaik di dunia. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi Indonesia untuk tetap memilih menjaga hubungan bilateralnya dengan Australia terkait dengan pemberian suaka politik kepada 43 warga Papua guna membantu perekonomian Indonesia keluar dari krisis sejak tahun 1997.

Dalam bidang perdagangan, terdapat beberapa sinyal positif yang menandai kemajuan perdagangan kedua negara. Pada tahun 2003, perdagangan Indonesia - Australia mencapai 6,7 miliar A\$ (4,46 miliar US\$, meningkat 11% dibandingkan tahun 2002). Nilai ekspor Indonesia mencapai 4,053 miliar A\$ (2,65 miliar US\$) sementara nilai impor dari Australia mencapai 2,762 A\$ (1,8 miliar US\$). Dengan demikian pada tahun 2003 Indonesia menikmati surplus dalam perdagangannya dengan Australia sebesar 1,291 miliar A\$ (846 juta US\$). Patut pula dicatat bahwa 'Official Development Aid' (ODA) Australia untuk Indonesia adalah A\$ 160.8 juta terbesar kedua setelah Papua Nugini yang menerima sekitar A\$ 300 juta.

Walaupun perekonomian Indonesia didera krisis sejak tahun 1997, sekitar 400 perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia tetap mempertahankan roda bisnisnya dengan mitra mereka di Indonesia. Nilai investasi perusahaan-perusahaan Australia ini cukup berarti bagi Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam bidang militer, kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Australia telah terjalin sejak lama. Dimana dalam rangka menjaga keamanan dan batas wilayah kedua negara sering mengadakan latihan militer bersama. Karena posisi kedua negara yang strategis, kerjasama di bidang keamanan harus dilakukan yang berwujud *agreement on maintaining security* (AIMS) yang dilaksanakan tanggal 12 Desember

---

<sup>17</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com>

memperlihatkan pasang surutnya hubungan antara Indonesia dengan Australia seperti pada masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ.Habibie.

Dalam penelitian ini diberikan batasan dalam menulis hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia yaitu satu tahun sejak diberikannya pemberian suaka pada bulan Maret 2006 sampai bulan Maret 2007. Pada dekade pemerintahan Gus Dur dan Megawati bila terjadi suatu peristiwa besar, peristiwa itu tidak memperlihatkan pola hubungan kedua negara secara signifikan. Sejumlah peristiwa yang dikedepankan adalah perubahan kepemimpinan nasional yang diikuti oleh sejumlah perubahan persepsional seperti orientasi, perilaku, sikap, gaya, dan tindakan politik.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan karena itu pengumpulan data diambil dari buku-buku literatur, laporan-laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal, makalah, dokumen, surat kabar dan data-data sekunder lainnya untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Indonesia dalam rangka upaya normalisasi hubungan bilateral dengan Australia. Selain itu penulis akan juga menggunakan metode deduktif yaitu dengan berdasarkan pada kerangka teori, kemudian ditarik hipotesa yang akan

pemerintah Indonesia dalam memperbaiki hubungan bilateralnya dengan Australia pasca pemberian suaka warga Papua. Selain itu, akan dijelaskan hanya pada masa periode kepemimpinan tertentu saja di Indonesia dimana benar-benar memperlihatkan pasang surutnya hubungan antara Indonesia dengan Australia seperti pada masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ.Habibie.

Dalam penelitian ini diberikan batasan dalam menulis hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia yaitu satu tahun sejak diberikannya pemberian suaka pada bulan Maret 2006 sampai bulan Maret 2007. Pada dekade pemerintahan Gus Dur dan Megawati bila terjadi suatu peristiwa besar, peristiwa itu tidak memperlihatkan pola hubungan kedua negara secara signifikan. Sejumlah peristiwa yang dikedepankan adalah perubahan kepemimpinan nasional yang diikuti oleh sejumlah perubahan persepsional seperti orientasi, perilaku, sikap, gaya, dan tindakan politik.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan karena itu pengumpulan data diambil dari buku-buku literatur, laporan-laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal, makalah, dokumen, surat kabar dan data-data sekunder lainnya untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Indonesia dalam rangka upaya normalisasi hubungan bilateral dengan Australia. Selain itu penulis akan juga menggunakan metode deduktif yaitu dengan berdasarkan pada kerangka teori, kemudian ditarik hipotesa yang akan

## **I. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Tujuan Penulisan
- C. Latar Belakang Masalah
- D. Pokok Permasalahan
- E. Kerangka Dasar Teori
- F. Hipotesa
- G. Jangkauan Penulisan
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

### **BAB II DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA SEBELUM PEMBERIAN SUAKA**

- A. Periode Kepemimpinan Presiden Soekarno
- B. Periode Kepemimpinan Presiden Soeharto
- C. Periode Kepemimpinan Presiden BJ.Habibie

### **BAB III HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA PADA SAAT PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA**

- A. Alasan Kebijakan Pemerintahan Australia Memberikan Suaka
  - A.1 Konvensi PBB tahun 1951 tentang Pengungsi
- B. Reaksi Indonesia Atas Pemberian Suaka
  - B.1. Kronologi Kejadian Pencarian Suaka
  - B.2. Dampak Politik dan Hukum Pemberian Suaka

**BAB IV HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA DALAM ISU  
PEMBERIAN SUAKA 43 WARGA PAPUA**

**A. Kuatnya elit birokrasi dalam menentukan kebijakan keputusan di dalam politik dalam negeri.**

**B. Ekonomi dan militer Indonesia yang masih bergantung kepada Australia.**

**C. Melambatkan posisi Indonesia dalam dunia internasional.**